

**RENCANA PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH
BNN KOTA PALOPO
TAHUN 2020-2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala , Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Program Kerja Jangka Menengah (RENPROJA) Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Tahun 2020 – 2024 ini dapat disusun.

Rencana Program Kerja Jangka Menengah (RENPROJA) ini disusun sebagai perwujudan kewajiban dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Narkotika Nasional Palopo pada tahun 2020 - 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi dalam rangka pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Program Kerja Jangka Menengah (RENPROJA) Tahun 2020 - 2024 ini. Semoga semua rencana kerja yang telah ditetapkan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan meridhoi segala aktifitas kita semua sehingga dapat bernilai ibadah, Amin.

Palopo, Juni 2020

Kepala BNN Kota Palopo



Ustim Pangarian, SE., M.Si

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

- a. Data kasus tindak pidana narkoba yang ditangani di BNN Kota Palopo

URAIAN	2016	2017	2018	2019
Jumlah kasus tindak pidana narkoba	10	7	3	2
Jumlah tersangka kasus tindak pidana narkoba	14	19	7	10
Jumlah Barang Bukti Narkotika				
a. Shabu		129,92 gr	21,35 gr	49 gr
b. Ganja				
c. Heroin				
d. Narkotika lainnya				

b. Peredaran Gelap Narkotika

Berdasarkan pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkotika di Sulawesi Selatan oleh POLDA Sulsel semua kabupaten/ kota dapat ditemukan. Berkaitan dengan data pengungkapan kasus tersebut, dapat dilihat persebaran kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Kabupaten/kota yang paling rawan yaitu Kota Makassar, kemudian Kab Gowa, Kab. Wajo, Kota Palopo, Kab. Sidrap, , Kab. Bulukumba, Kab. Takalar dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah .

Sumber : Polda Sulselbar 2020 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SULAWESI SELATAN
 DIREKTORAT RESERSE NARKOBA`

PERB DATA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
 DIT RESNARKOBA POLDA SULSEL DAN JAJARAN
 PERIODE 2018 S/D 2020

NO	Kesatuan	TAHUN					
		2018		2019		2020	
		LPR	SLS	LPR	SLS	LPR	SLS
1	Dit Narkoba	187	129	268	244	359	294
2	Restabes Mks	270	278	443	460	432	466
3	Res Pelabuhan	81	77	148	146	101	94
4	Res Gowa	86	91	177	199	182	224
5	Res Maros	36	27	70	56	60	57
6	Res Pares	31	27	35	23	48	36
7	Res Pangkep	19	6	45	40	43	29
8	Res Barru	26	20	36	34	35	37
9	Res Pinrang	69	86	78	66	79	63
10	Res Sidrap	64	77	104	126	89	83
11	Res Enrekang	8	5	14	13	19	14
12	Res Tator	12	9	16	23	10	12
13	Res Luwu	24	33	31	25	37	32
14	Res Palopo	37	35	62	44	72	60
15	Res Lutra	28	18	47	43	44	50
16	Res Lutim	23	14	29	29	37	25
17	Res Bone	41	45	53	62	48	54
18	Res Wajo	43	30	82	73	86	71
19	Res Soppeng	15	12	28	25	32	27
20	Res Sinjai	28	20	43	33	25	28
21	Res Selayar	12	10	14	11	8	8
22	Res B. Kumba	26	37	65	47	67	64
23	Res Bantaeng	9	14	18	24	34	24
24	Res Jeneponto	26	13	49	76	50	53
25	Res Takalar	21	16	41	42	79	78
26	Res Toraja Utara					13	12
Jumlah		1.217	1.103	1.996	1.994	2089	1995

Sedangkan untuk barang bukti sitaan narkotika di Sulawesi Selatan sangat bervariasi setiap tahunnya, pada tahun 2020 barang sitaan terbanyak yaitu Daftar G (34.616 butir), Ekstasi (12.088), shabu (32.217,7398 Gram), dan ganja (1,014,4765 gram) Secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

Barang Bukti Sitaan Narkotika oleh POLDA Sulselbar dan BNNP Sulsel Menurut Jenis Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun				Jumlah
		2017	2018	2019	2020	
1	Shabu	20,927 kg	15,375 kg	50,081 Kg	32.217 Gram	118,600 kg
2	Ekstacy	1.039 btr	181,5	3.307	12088 butir	16.615 btr
3	Putaw	nihil	nihil	Nihil	nihil	nihil
4	Ganja	863,12	5,213 kg	12,039 Kg	1.014 Gram	17.252 kg
5	Daftar G	947.001	90.017	40.969	34.616 butir	1.112.603 btr
6	Sintetis				310 gram	310 Gram

Sumber : POLDA dan BNNP

Situasi Tahanan Kasus Bandar/Pengedar dan Pengguna Narkotika Berdasarkan Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan 2019-2020

No	Satker	2019		2020	
		Narkoba Bandar/Pengedar	Narkoba Pengguna	Narkoba Bandar/Pengedar	Narkoba Pengguna
1	LAPAS KELAS I MAKASSAR	66	53	8	23
2	LAPAS KELAS II A BULUKUMBA	625	1139	1079	1188
3	LMBG PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS	1206	3025	605	1689
4	LAPAS KELAS II A PALOPO	308	402	4210	381
5	LAPAS KELAS II A WATAMPONE	9661	1140	929	955
6	LAPAS KELAS II B TAKALAR	4350	28	5487	40

7	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A SUNGGUMINASA	4913	6351	2697	6620
8	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA	2496	53	2663	236
9	LAPAS KELAS II A PARE-PARE	3751	361	3818	884
10	RUTAN KELAS I MAKASSAR	8171	7464	7824	7837
11	RUTAN KELAS II B BANTAENG	570	209	461	322
12	RUTAN KELAS II B BARRU	1200	224	1153	93
12	RUTAN KELAS II B ENREKANG	188	964	120	698
14	RUTAN KELAS II B JENEPONTO	684	205	826	233
15	RUTAN KELAS II B MAKALE	53	0	92	32
16	RUTAN KELAS II B MALINO	72	214	8	286
17	RUTAN KELAS II B MASAMBA	946	716	1010	329
18	RUTAN KELAS II B PANGKAJENE	1015	1585	1373	1507
19	RUTAN KELAS II B PINRANG	3102	46	2729	94
20	RUTAN KELAS II B SELAYAR	282	80	230	33
21	RUTAN KELAS II B SENKANG	1814	399	2227	13
22	RUTAN KELAS II B SIDENRENG RAPANG	883	1706	1205	1724
23	RUTAN KELAS II B SINJAI	398	782	539	782
24	RUTAN KELAS II B WATANSOPPENG	686	138	999	99

Sumber : Kanwil Kumham 2020

c. Data penyalah guna narkoba yang lapor diri atau voluntary.

URAIAN	2016	2017	2018	2019
Penyalahguna narkoba yang lapor diri voluntary	73	36	25	25

d. Data fasilitas layanan rehabilitasi (LRIP dan LRKM)

FASILITAS LAYANAN REHAB	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	KET
Klinik Pratama Wijaya Sakti BNN Kota Palopo	√		MEDIS
RSUD Sawerigading	√		MEDIS
Puskesmas Wara Utara Kota Palopo	√		MEDIS
Lembaga Rehab Hati	√		SOSIAL
RS Mujaisyah	√		MEDIS

e. Data fasilitas IPWL (kategori aktif atau tidak)

FASILITAS IPWL	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	KET
Klinik Pratama Wijaya Sakti BNN Kota Palopo	√		AKTIF
RSUD Sawerigading	√		AKTIF

f. Data penyalah guna narkoba yang telah mendapat layanan rehabilitasi.

LEMBAGA REHAB	2016	2017	2018	2019
Klinik Pratama Wijaya Sakti BNN Kota Palopo	30	15	25	25
RSUD Sawerigading		5	4	
Puskesmas Wara Utara Kota Palopo			2	5
Lembaga Rehab Hati		4	24	10
RS Mujaisyah		2	16	10

g. Data dan informasi kondisi demografi kewilayahan, sekolah, perguruan tinggi

1) Demografi Wilayah

Luas Wilayah : 247,52 km² atau sama dengan 0,39 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Batas Wilayah:

Utara : Kabupaten Luwu (kec. Walmas)

Selatan : Kabupaten Luwu (Kec. Bua)

Barat : Kabupaten Tana Toraja

Timur : Teluk Bone

Secara Administratif terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan, dengan jumlah penduduk, 176.907 Jiwa

2) Jumlah Sekolah (SD, SLTP, SLTA), Guru, Murid/ Siswa

NO	TINGKAT SEKOLAH	JML SEKOLAH	SISWA/MAHASISWA
1	SD	80	18.719
2	SLTP UMUM / MTS	30	10.137
3	SMU/SMK/MA	31	11.785
4	PERGURUAN TINGGI	14	18.513
	TOTAL	155	59.154

h. Data SDM BNN Kota Palopo.

Jumlah Tenaga yang Dimiliki Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	Strata Dua	1	Orang
2	Strata Satu	12	Orang
2	Diploma III	1	Orang
3	SLTA	2	Orang
	Jumlah	16	Orang

Jumlah Tenaga yang Dimiliki Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Berdasarkan subbag/seksi

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Kepala	1	
2	Eselon IV	4	
3	Jab. Fungsional / pelaksana pada Subag Umum	4	
4	Jab. Fungsional pada Seksi P2M	3	

5	Jab. Fungsional pada Seksi Rehabilitasi	0	
6	Jab. Fungsional pada Seksi Pemberantasan	4	
	Jumlah	16	

Jumlah Kebutuhan Tenaga Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

NO	URAIAN	STANDAR BNN	SDM YANG DIMILIKI	KEBUTUHAN
1	KEPALA	1	1	0
2	ESELON IV	4	4	0
3	FUNGSIONAL SUBBAG UMUM	17	4	13
4	FUNGSIONAL SEKSI P2M	16	3	14
5	FUNGSIONAL SEKSI REHABILITASI	19	0	19
6	FUNGSIONAL SEKSI PEMBERANTASAN	21	4	20
	JUMLAH	78	16	62

Daftar Aset Barang Milik Negara pada Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

NO	URAIAN	KEADAAN 2019	KET
1	Peralatan dan Mesin	295 unit	
2	Gedung dan Bangunan	1 unit	Luas bangunan utama : 16,40 m x 14,40 m Luas tanah: 40 m x 50 m = 2.000 m ² Luas pekarangan: 1.763,84 m ²
3	Jaringan Telepon	3 unit	

i. Sarana klinik BNN Kota Palopo

BNN Kota Palopo memiliki Klinik Pratama Wijaya Sakti, yang telah didukung ruang klinik, fasilitas klinik, Dokter dan tenaga perawat. Sampai sekarang BNN Kota Palopo belum memiliki gedung khusus untuk layanan klinik.

j. Senjata api

BNN Kota Palopo memiliki 4 unit senjata api, 3 unit laras pendek dan 1 unit laras panjang.

k. Capaian dan evaluasi kinerja periode 2019.

Pencapaian rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Palopo pada tahun 2019 dapat dilihat dari komponen kegiatan yang dianggarkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan rencana. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan meliputi input, output dan outcome. Berdasarkan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang ditertibkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, maka skala pengukuran kinerja yang dipakai dalam laporan ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) 85 - 100 = Sangat Baik
- 2) 70 - < 85 = Baik
- 3) 55 - < 70 = Cukup baik
- 4) < 55 = Kurang Baik

Evaluasi capaian out put dilakukan guna mengetahui capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Palopo tahun 2019 dengan melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi, tabel maupun grafik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BNN Kota Palopo Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja BNN Kota Palopo tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Tahun 2019

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya Kebijakan Institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan masalah Narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	3	Institusi/ Lembaga
2	terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi program pemberdayaan alternatif	1	kawasan/ wilayah
3	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi P4GN	persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7	%
4	Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba	8	Institusi/ Lembaga
5	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	2	Fasilitas
		Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah	100	%
6	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	2	Fasilitas

	rehabilitasi Komponen Masyarakat yang memadai	Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat	100	%
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	4	Berkas
8	Terselenggaranya Proses Manajemen Kinerja yang efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88	

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1.	Jumlah Institusi atau Lembaga yang Responsif Terhadap Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba
-----------	--

Definisi Operasional :

Jumlah Institusi / Lembaga yang Responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba adalah jumlah Lembaga yang disentuh kegiatan advokasi pembangunan kebijakan berwawasan anti Narkoba yang dapat merespon kemudian menerapkan kebijakan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya untuk mewujudkan lingkungan bersih narkoba.

Metodologi pelaksanaan kegiatan advokasi dalam proses penilaian kualitas implementasi program P4GN di tetapkan beberapa kriteria antara lain : Terdapatnya keinginan yang kuat dari institusi/lembaga untuk ikut berperan serta dalam pembangunan kebijakan berwawasan anti narkoba dengan membentuk tim penyusun kebijakan anti narkoba di lingkungan kelompok masyarakat dan institusi pendidikan,

mengundang kebijakan berwawasan anti narkoba tersebut hingga pada akhirnya dapat diketahui aturan tersebut dapat diterima dan diterapkan.

Untuk menilai kriteria tersebut petugas pelaksana kegiatan advokasi secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan penyusunan pembangunan kebijakan berwawasan anti Narkoba setelah Rapat sinergitas dengan institusi terkait dilaksanakan untuk memastikan instansi/ lembaga akan atau sedang dalam proses pembangunan kebijakan berwawasan anti narkoba di lingkungan kerja masing-masing.

Capaian Kinerja pada pelaksanaan Advokasi pembangunan berwawasan anti Narkoba di BNN Kota Palopo, bahwa setelah dilaksanakan advokasi terhadap sasaran lingkungan masyarakat dan institusi pendidikan dan hasilnya lingkungan masyarakat dan institusi pendidikan sangat merespon kebijakan Program P4GN untuk kemudian diterapkan dan dilaksanakan di lingkungannya masing-masing.

Hasil pelaksanaan advokasi di lingkungan masyarakat dan institusi pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

No	Nama Lingkungan/ institusi pendidikan yang di advokasi	Bentuk Intervensi Pelaksanaan Advokasi	Hasil Pelaksanaan Advokasi
1	BKMT Wara Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan advokasi 2. Asistensi 3. Supervisi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merespon dengan baik program P4GN 2. Melaksanakan Diseminasi informasi P4GN dalam bentuk kegiatan penyuluhan bahaya narkoba 3. pembentukan relawan anti narkoba
2	BKMT Telluwanua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan advokasi 2. Asistensi 3. supervisi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merespon dengan baik program P4GN 2. Melaksanakan Diseminasi informasi P4GN dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan pemasangan media luar ruang STOP NARKOBA 3. Pembentukan Relawan anti narkoba

3	BKMT Sendana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan advokasi 2. Asistensi 3. Supervisi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merespon dengan baik program P4GN 2. Melaksanakan Diseminasi informasi P4GN dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan pemasangan media luar ruang STOP NARKOBA 3. Pembentukan Relawan anti narkoba
4	SMK Negeri 5 Palopo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan advokasi 2. Asistensi 3. Supervisi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merespon dengan baik program P4GN 2. Pelaksanaan penyuluhan P4GN 3. Pembentukan relawan anti narkoba
5	MAN Palopo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan advokasi 2. Asistensi 3. Supervisi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merespon dengan baik program P4GN 2. pelaksanaan diseminasi informasi P4GN di lingkungan sekolah 3. Pembentukan relawan anti narkoba 4. Penerbitan regulasi/ kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba di lingkungan sekolah
6	SMK Pelayaran Samudera Nusantara Utama Palopo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan advokasi 2. Asistensi 3. Supervisi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merespon dengan baik program P4GN 2. Penerbitan regulasi/ kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba di lingkungan sekolah. 3. Melaksanakan diseminasi informasi P4GN melalui pemasangan Spanduk 4. Pelaksanaan tes urin 5. Pembentukan Relawan anti narkoba

Pencapaian indikator kinerja ini dapat digambarkan secara sederhana pada tabel di bawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah institusi atau lembaga responsive terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	3 Lembaga	6 Lembaga	200

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja:

- a. Respon yang baik dari Kepala/pimpinan Satuan unit kerja/kelompok masyarakat;
- b. Adanya kesadaran dari anggota kelompok masyarakat/siswa dari instansi pendidikan untuk melaksanakan program P4GN
- c. Adanya pelaksanaan penyuluhan P4GN yang memberikan informasi tentang bahaya Narkotika.
- d. Adanya asistensi dan supervisi dari tim BNN Kota Palopo

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan advokasi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kemungkinan perubahan kebijakan pimpinan yang baru di lingkungan masyarakat/ institusi pendidikan
- b. Kebijakan penganggaran di lingkungan masyarakat dan institusi pendidikan untuk program P4GN;
- c. Peningkatan kualitas SDM di lingkungan masyarakat dan institusi pendidikan;
- d. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana dalam pencapaian hasil.
- e. Pelaksanaan Advokasi yang kadang tidak berkesinambungan.

2.

Jumlah kawasan/ wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan alternatif

Definisi Operasional :

Jumlah kawasan/ wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan alternatif adalah laporan penghitungan jumlah kawasan atau wilayah rawan yang merupakan konsentrasi kerja dari direktorat lingjamas (lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat) yang diintervensi dalam program pemberdayaan anti narkoba baik itu pemberdayaan manusia berupa kader penggiat, pemberdayaan anggaran ataupun pemberdayaan sarana dan prasarana lokal untuk mendukung pelaksanaan program P4GN.

Metodologi yang digunakan untuk mengukur kawasan/ wilayah rawan yang diintervensi program pemberdayaan anti narkoba dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima manfaat pelaksanaan program pemberdayaan alternative pada kawasan rawan. Adapun hasil yang diharapkan / hasil yang ingin dicapai dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan alternative di kawasan rawan:

1. bertambahnya keterampilan masyarakat rentan narkoba di bidang keterampilan skill kerja setelah dibekali dengan pengetahuan life skill oleh instruktur
2. adanya keinginan dari masyarakat rentan untuk membentuk kelompok secara mandiri
3. kesediaan lembaga terkait untuk memberkan bantuan dan fasilitator bagi masyarakat rentan jika sudah membentuk kelompok secara mandiri
4. Pembinaan masyarakat kawasan rawan narkoba secara berkesinambungan untuk pemberdayaan tenaga tenaga terampil life skill.

Penetapan kawasan pada indikator kinerja ini adalah Kecamatan Wara Timur. Bentuk intervensi yang telah dilakukan dalam capaian indikator kinerja ini adalah dengan melaksanakan pemetaan wilayah, koordinasi, asistensi, melaksanakan bimtek life skill bagi masyarakat kawasan rawan narkoba, pelaksanaan bimtek dalam rangka sinergitas program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder di wilayah Kecamatan Wara Timur.

dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilaksanakan tahapan kegiatan berupa:

1. pemetaan kawasan/ wilayah dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait / stakeholder.
2. Pelaksanaan rapat kerja teknis
3. audiens dengan stakeholder
4. pemberian Bimbingan Teknis Life Skill
5. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka sinergitas
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Setelah pelaksanaan tahapan kegiatan tersebut di atas, dari hasil monitoring dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan alternatif pada kawasan rawan perkotaan yaitu di Kecamatan Wara Timur memberikan hasil yang positif dengan melihat indikator:

1. Peserta yang mengikuti bimtek life skill bertambah keterampilannya khususnya pada bidang servis AC
2. Peserta yang telah mengikuti bimtek life skill sebahagian telah membentuk kelompok untuk menjalankan usaha jasa servis AC
3. Terdapat perusahaan yang bergerak di bidang servis AC yang mempekerjakan peserta yang telah mengikuti bimtek Life Skill
4. Para instruktur pada bimtek life skill terus secara berkesinambungan memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada peserta life skill.

5. Para tokoh masyarakat dan pemerintah setempat sangat mendukung program pemberdayaan alternatif.pada kawasan wilayah Wara Timur Kota Palopo.

Secara sederhana, pencapaian kinerja pada indikator ini dapat kami gambarkan dalam tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah kawasan/wilayah rawan yang diintervensi dalam program pemberdayaan alternative	1 wilayah	1 wilayah	100

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah:

1. Dukungan Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Swasta, dan elemen masyarakat lainnya pada kawasan rawan;
2. Keinginan masyarakat kawasan rawan untuk ikut giat life skill sebagai bagian dari program pemberdayaan alternatif.

Adapun hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Dibutuhkan tambahan anggaran untuk pelaksanaan pemberdayaan yang berkesinambungan;
2. Dibutuhkan kerjasama yang lebih real dengan pihak-pihak terkait dalam pemberdayaan kawasan rawan;
3. Perlu pemberdayaan yang berkesinambungan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat;

3. Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi P4GN

Definisi Operasional

Secara sederhana yang dimaksud dengan persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN adalah tingkat keberhasilan fungsi diseminasi informasi yang telah disusun atau diproduksi Penyuluh (tim penyusun konten informasi P4GN) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian disampaikan melalui media elektronik dan media Non Elektronik. Keberhasilan fungsi dihitung dengan melakukan pencacahan jumlah masyarakat yang telah memperoleh konten informasi P4GN yang telah dipublikasi melalui media elektronik dan media non elektronik dengan menggunakan metode pencacahan data yang terdiri dari 3 tahapan yaitu :

1. Tahap pengukuran output yaitu jumlah konten informasi P4GN yang disusun;
2. Pengukuran sebaran informasi yakni penghitungan jumlah orang yang mendapat informasi;
3. Pengukuran tingkat pemahaman, efektifitas KIE dan media diseminasi.

Secara umum gambaran definisi operasional dan metodologi pengukuran capaian kinerja diatas sesuai dengan *frame logic* kinerja Direktorat Diseminasi informasi yang mana akan menjadi acuan dalam menghitung capaian indikator kinerja seperti pada gambar di bawah :



Gambar 1. Frame logic kinerja Direktorat Diseminasi Informasi BNN

Dari penggambaran logic model di atas jelas bahwa setiap satuan kerja pengemban fungsi diseminasi informasi P4GN melaksanakan penyusunan konten informasi P4GN untuk setiap segmen baik itu informasi P4GN kepada keluarga, Informasi P4GN kepada pelajar- mahasiswa, informasi P4GN kepada pekerja, dan informasi P4GN kepada Masyarakat. Konten Informasi yang telah disusun kemudian disebarluarkan melalui media elektronik dan media Non elektronik dan menghitung jumlah orang yang tersentuh informasi tersebut hingga melakukan pengukuran efektifitas informasi P4GN yang telah dilakukan.

Target indikator kinerja kegiatan persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN adalah sebesar 7 % dari jumlah populasi masyarakat di Kota Palopo. Sesuai data dari BPS Kota Palopo Tahun 2018, jumlah penduduk Kota Palopo sebanyak 176.907 jiwa, sehingga target indikator kinerja kegiatan Diseminasi informasi P4GN adalah sebanyak 7 % dari 176.907 jiwa penduduk Kota Palopo setara dengan 12.383 jiwa.

Sebaran konten informasi P4GN yang disampaikan BNN Kota Palopo baik melalui anggaran DIPA maupun non DIPA adalah sebanyak 95 sebaran Informasi dan menjangkau sebanyak 41.080 orang yang terpapar informasi P4GN dengan rincian:

1. diseminasi informasi P4GN melalui media konvensional Tatap Muka sebanyak 82 sebaran Informasi dengan penerima informasi sebanyak 13.193 orang.
2. diseminasi informasi melalui media cetak luar ruang sebanyak 9 titik sebaran informasi melalui kegiatan cetak baliho, bill board dan Spanduk dengan materi bahaya penyalahgunaan narkoba dengan penerima informasi sebanyak 24.340 orang.

3. diseminasi informasi melalui media cetak lainnya sebanyak 1 sebaran informasi dengan jumlah penerima informasi sebanyak 1.500 orang (sesuai jumlah oplah).
4. Diseminasi informasi melalui media Online sebanyak 4 sebaran informasi, yaitu melalui media Instagram, web site, youtube chanel dan Facebook dengan jumlah penerima informasi sebanyak 2.047 orang.

sehingga capaian indikator kinerja dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7 %	23,22 %	331,71

Untuk memperoleh nilai capaian realisasi tersebut di atas (23,22%) dengan menggunakan rumus = (jumlah penduduk yang terpapar informasi P4GN/ jumlah penduduk)x 100%

Hasil evaluasi efektivitas informasi P4GN yang telah disebarkan terhadap masyarakat Kota Palopo dilakukan dengan cara memberikan free test dan post test, dan dari hasil pengukuran diperoleh nilai rata-rata masyarakat yang menerima informasi P4GN masuk dalam kategori tahu dan paham.

faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja ini:

1. Dukungan dari Pemerintah daerah, kelompok masyarakat, lingkungan pendidikan, swasta dan seluruh elemen masyarakat dalam penyebaran informasi P4GN.
2. Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyebaran informasi P4GN secara luas kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari tingginya permintaan dari masyarakat untuk dilaksanakan penyuluhan P4GN di lingkungannya masing-masing.

Hambatan dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

1. Terbatasnya SDM khususnya penyuluh narkoba sehingga belum dapat menjangkau semua lapisan masyarakat secara merata;
2. Perlunya peningkatan kualitas SDM tenaga penyuluh;
3. Perlunya dilakukan penelitian ilmiah untuk pemanfaatan metode yang efektif dalam penyebaran informasi P4GN.

4.	Jumlah Instansi/ lingkungan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba
-----------	---

Definisi Operasional :

Jumlah instansi/ lingkungan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba adalah laporan penghitungan jumlah instansi atau lingkungan masyarakat yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba baik itu pemberdayaan manusia berupa kader penggiat, pemberdayaan anggaran ataupun pemberdayaan sarana dan prasarana lokal untuk mendukung pelaksanaan program P4GN.

Metodologi yang digunakan untuk mengukur instansi atau lingkungan yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba dengan mengukur indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam program pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terdiri dari 6 (enam) Aspek dan kriteria yakni Manusia, Metode, Anggaran, sistem, sarana prasarana, dan kegiatan.

Metodologi pengukuran besaran peningkatan kesadaran partisipatif dalam P4GN adalah evaluasi menggunakan penilaian indeks kemandirian pada rentan waktu 3 bulan setelah diintervensi dan dengan melakukan teknik:

- 1) Wawancara;

- 2) Pengamatan langsung (monitoring) aktivitas P4GN pada sasaran;
- 3) Kuisisioner;
- 4) Penilaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Untuk mengukur indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN yang telah dilakukan intervensi pemberdayaan yang masing-masing berasal dari Instansi Pemerintah, lingkungan pendidikan, instansi swasta dan lingkungan masyarakat dengan melakukan pengukuran pada 6 aspek penilaian :

ASPEK	KRITERIA	BOBOT	JAWABAN				JUMLAH
			a	b	c	d	
ASPEK MANUSIA	Tokoh/Relawan/kader/penggiat	6					
ASPEK METODE	Cara melakukan kegiatan	1					
ASPEK ANGGARAN	Swadaya dan bantuan	3					
ASPEK SISTEM	Regulasi/aturan/norma/kebijakan	4					
ASPEK SARPRAS	Alat pendukung/promosi	2					
ASPEK KEGIATAN	Penyuluhan/sosialisasi/tes urin	5					
	Jumlah	21					

Hasil penilaian Indeks kemandirian Instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba Tahun 2019

NO	INSTANSI / ORGANISASI	LINGKUNGAN	IKM	KATEGORI	KETERANGAN
1	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo	Instansi Pemerintah	2,61	MANDIRI	
2	Dinas Kominfo Kota Palopo	Instansi Pemerintah	2,61	MANDIRI	
3	Inspektorat Kota Palopo	Instansi Pemerintah	2,52	MANDIRI	
4	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo	Instansi Pemerintah	2,61	MANDIRI	
5	Kelurahan Songka	Masyarakat	2,61	MANDIRI	
6	Kelurahan Balandai	Masyarakat	3,52	SANGAT MANDIRI	
8	SMP Negeri 9 Palopo	Pendidikan	2,71	MANDIRI	
9	SMA Negeri 4 Palopo	Pendidikan	3,42	SANGAT MANDIRI	
10	SMK Negeri 4 Palopo	Pendidikan	2,61	MANDIRI	
11	STIKES Kurnia Jaya Palopo	Pendidikan	2,52	MANDIRI	
13	PT. Elnusa Petrofin TBBM Palopo	Swasta	3,52	SANGAT MANDIRI	
14	PT. Adira Finance Cabang Palopo	Swasta	2,8	MANDIRI	
		Nilai rata-rata	2,62	MANDIRI	

Dari data di atas diketahui capaian kinerja pemberdayaan masyarakat pada tahun 2019 yang memfokuskan penilaian indeks kemandirian partisipasi (IKP) stakeholder dengan nilai IKP rata-rata sebesar 2,62 dan masuk dalam kategori kualitas Mandiri (B). Dari 12 instansi/lingkungan yang telah diintervensi tersebut di atas telah nyata partisipasinya dalam melaksanakan program P4GN di lingkungannya masing-masing.

Faktor Pendukung tercapainya target pada indikator kinerja ini:

1. Dukungan dari Pemerintah Daerah Kota Palopo;
2. Partisipasi aktif dalam program P4GN dari lingkungan masyarakat, instansi pemerintah, Swasta dan Lingkungan Pendidikan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini:

- 1) Perubahan Kebijakan pimpinan;
- 2) Aturan mengikat dalam penganggaran
- 3) Perlunya mendorong Pemerintah daerah untuk mendukung Program P4GN, baik dukungan dalam bentuk program atau dukungan anggaran secara khusus.
- 4) Regulasi program P4GN di Daerah

5.	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional
-----------	---

Definisi Operasional :

Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah Rumah sakit/ puskesmas/klinik milik pemerintah atau yang serupa yang dapat memberikan layanan rehabilitasi secara paripurna, layanan dimaksud mulai dari registrasi, asesment, konseling hingga persiapan pengembalian fungsi sosial di masyarakat yang terdiri atas 2 (dua) tipe layanan Rehabilitasi ketergantungan narkoba yaitu layanan Rehabilitasi rawat jalan dan layanan rehabilitasi rawat inap.

Metodologi yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja indikator kinerja ini adalah dengan melakukan survey dan pendataan layanan rehabilitasi yang telah dilaksanakan oleh fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah, dan yang dinilai adalah sistem informasi dan administrasi klien rehabilitasi yang tertata dengan baik, ketersediaan sumberdaya

manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasional layanan rehabilitasi ketergantungan narkoba.,

Untuk capaian IKK pada satuan kerja BNN Kota Palopo tahun 2019, setelah melakukan survey dan pendataan, maka terdapat 3 fasilitas rehabilitasi yang operasional dari 3 target yaitu Klinik Pratama Wijaya Sakti BNN Kota Palopo, RSUD Sawerigading Palopo dan Puskesmas Wara Utara. Dari ketiga fasilitas rehabilitasi yang operasional, semuanya telah melaksanakan layanan rehabilitasi. Khusus untuk RSUD Sawerigading Palopo, tahun 2019 telah ditunjuk menjadi IPWL.

Adapun fasilitas rehabilitasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	NAMA FASILITAS REHABILITASI	JENIS LAYANAN REHABILITASI	
		Rawat Jalan	Rawat Inap
1	Klinik Pratama Wijaya Sakti BNN Kota Palopo	√	
2	RSU Sawerigading Palopo	√	
3	Puskesmas Wara Utara	√	

Untuk capaian target kinerja jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional dapat digambarkan seperti pada tabel di bawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	2 Fasilitas	3 Fasilitas	150

Dalam pencapaian kinerja, faktor pendukung mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari Pemerintah daerah;
2. Adanya dukungan dari Lembaga rehab Instansi Pemerintah;
3. LRIP yang operasional sejak tahun 2017;
4. Tersedianya SDM.

Dari data diatas diketahui hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan Kompetensi SDM;
2. Perlunya Peningkatan sarana dan prasarana lembaga rehab;
3. Perlunya penguatan lembaga rehabilitasi.

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM;
2. Mendorong pihak pemerintah dan swasta untuk dapat memberikan bantuan alat/anggaran;

3. Membangun kerjasama antar lembaga rehabilitasi dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya

6.	Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah
-----------	---

Definisi Operasional :

Yang dimaksud dengan persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah adalah akumulasi serapan dana layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah. Target indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dari anggaran untuk pembiayaan layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah.

Metodologi yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja indikator kinerja ini adalah dengan melakukan pendataan progres pencairan anggaran layanan rehabilitasi instansi pemerintah, dimana nilai realisasi anggaran layanan rehabilitasi dibagi dengan pagu anggaran layanan rehabilitasi yang tersedia. Pada tahun anggaran 2019 pagu untuk paket layanan rehabilitasi instansi pemerintah sebesar Rp.25.950.000,-. Dengan total pagu sebesar tersebut untuk target layanan rehabilitasi sebanyak 30 Orang.

Layanan rawat jalan merupakan pelayanan rehabilitasi ketergantungan narkoba kepada pecandu untuk tujuan konseling, pengamatan, diagnosis, dan penerapan teraphy sosial lainnya berupa teraphy kelompok yang bersifat homogen biasanya dikelompokkan berdasarkan usia, sampai bahan adiktif/narkoba yang disalahgunakan, pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama klien dan konselor.

Sedangkan layanan rawat inap adalah pelayanan rehabilitasi sosial dan medis kepada pecandu narkoba yang diberikan dalam satu periode rehabilitasi.

Untuk rawat jalan digunakan standar penilaian berdasarkan tingkat kehadiran klien dalam 8 kali pertemuan rawat jalan, sedangkan untuk rawat inap adalah berapa klien yang sedang mengikuti dan menyelesaikan tahapan dalam layanan rehabilitasi rawat inap.

Kondisi capaian indikator ini pada satuan kerja BNN Kota Palopo sampai tahun 2019 adalah sebesar 100% dengan jumlah yang mendapat layanan rehabilitasi sebanyak 30 orang, yaitu 25 orang pada Klinik BNN Kota Palopo, dan pada Puskesmas Wara Utara sebanyak 5 Orang.

Capaian kinerja persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah tahun 2019 seperti pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah	100 %	100	100

Dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang telah dilaksanakan diketahui hambatan dan tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak warga masyarakat yang tidak memahami alur/proses program rehabilitasi;

2. Kurangnya dukungan dari keluarga korban penyalahguna untuk mengikuti program rehabilitasi karena menganggap aib bagi keluarga;
3. Kurangnya kesadaran para pengguna/penyalahguna narkoba untuk melaporkan diri untuk selanjutnya diberikan layanan rehabilitasi;
4. Sarana pendukung pelaksanaan rehabilitasi;
5. Keterbatasan SDM.

Adapun Faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah:

1. Semangat kerja dari Personil BNN Kota Palopo dalam mensosialisasikan program rehabilitasi ke instansi-instansi
2. dukungan dari mitra lembaga rehabilitasi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan program rehabilitasi
3. dukungan dari instansi pendidikan dan masyarakat yang aktif melaporkan di lingkungannya jika terdapat penyalahguna narkoba
4. adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang program rehabilitasi

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. memberikan sosialisasi secara massiv ke masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat terkait akan adanya program rehabilitasi bagi pengguna/pecandu narkoba;
2. Pengadaan sarana pendukung layanan rehabilitasi;
3. Pengadaan SDM yang berkompeten

7.

Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional

Definisi Operasional :

Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional adalah Rumah sakit/ puskesmas/klinik milik komponen masyarakat atau yang serupa yang dapat memberikan layanan rehabilitasi secara paripurna, layanan dimaksud mulai dari registrasi, asesment, konseling hingga persiapan pengembalian fungsi sosial dimasyarakat yang terdiri atas 2 (dua) tipe layanan Rehabilitasi ketergantungan narkoba yang terdiri dari layanan Rehabilitasi rawat jalan dan layanan rehabilitasi rawat inap.

Metodologi yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja indikator kinerja ini adalah dengan melakukan survey dan pendataan layanan rehabilitasi yang telah dilaksanakan oleh fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang dinilai adalah sistem informasi dan administrasi klien rehabilitasi yang tertata dengan baik, ketersediaan sumberdaya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasional layanan rehabilitasi ketergantungan narkoba.

Untuk capaian IKK pada satuan kerja BNN Kota Palopo tahun 2019 terdapat 2 fasilitas rehabilitasi yang operasional. Pada indikator kinerja ini sebanyak 2 target jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional yaitu Rumah Sakit Umum Mujaisyah untuk layanan rehab medis rawat jalan dan Lembaga Rehab Hati untuk layanan rehab sosial. Di tahun 2019, RSUD Mujaisyah melaksanakan layanan rehab sebanyak 10 klien dan Lembaga Hati melaksanakan layanan rehab sosial sebanyak 10 klien.

Untuk capaian pada indikator ini yaitu jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional seperti pada tabel di bawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	2 Fasilitas	2 Fasilitas	100

Dalam pencapaian kinerja, faktor pendukung mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari Pemerintah daerah;
2. Adanya dukungan dari Lembaga rehab komponen masyarakat;
3. Tersedianya SDM.

Dalam pencapaian kinerja, hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan Kompetensi SDM;
2. Perlunya Peningkatan sarana lembaga rehab;
3. Perlunya penguatan kerjasama antar lembaga rehabilitasi dengan Pemerintah.

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM;
2. Mendorong pihak pemerintah dan swasta untuk dapat memberikan bantuan alat/anggaran;
3. Membangun kerjasama antar lembaga rehabilitasi dengan Pemerintah.

8.	Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat
-----------	---

Definisi Operasional :

Yang dimaksud dengan persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat adalah akumulasi serapan dana layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat. Target indikator kinerja ini adalah sebesar 100 % dari anggaran untuk pembiayaan layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat.

Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam rehabilitasi sosial dikenal 2 model layanan yakni layanan rawat jalan dan layanan rawat inap.

Layanan rawat jalan merupakan pelayanan rehabilitasi ketergantungan narkoba kepada pecandu untuk tujuan konseling, pengamatan, diagnosis, dan penerapan teraphy sosial lainnya berupa teraphy kelompok yang bersifat homogen biasanya dikelompokkan berdasarkan usia, sampai bahan adiktif/narkoba yang disalahgunakan, pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama klien dan konselor. Sedangkan layanan rawat inap adalah pelayanan rehabilitasi sosial dan medis kepada pecandu narkoba yang diberikan dalam satu periode rehabilitasi.

Metodologi yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja indikator kinerja ini adalah dengan melakukan pendataan progress pencairan anggaran layanan rehabilitasi komponen masyarakat, dimana nilai realisasi

anggaran layanan rehabilitasi dibagi dengan pagu anggaran layanan rehabilitasi yang tersedia yaitu sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah). Dengan total pagu sebesar tersebut untuk target layanan rehabilitasi sebanyak 20 Orang

Setelah dilakukan pendataan pencairan anggaran, maka diketahui capaian persentase penyerapan pembiayaan sebesar 100 %.

Capaian kinerja pada indikator ini dapat digambarkan seperti pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat	100 %	100 %	100

Dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi komponen masyarakat diketahui hambatan dan tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya angka lapor diri pada IPWL yang ada di BNN Kota Palopo;
2. Masih kurangnya akses layanan rehabilitasi;
3. Masih banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui prosedur program rehabilitasi;
4. Kurangnya dukungan dari keluarga korban penyalahguna untuk mengikuti program rehabilitasi karena menganggap aib bagi keluarga;
5. Kurangnya kesadaran para pengguna/penyalahguna narkoba untuk melaporkan diri untuk selanjutnya diberikan layanan rehabilitasi.

Adapun faktor pendukung tercapainya target indikator kinerja yaitu:

1. Semangat kerja dari Mitra Kerja LRKM dalam melaksanakan dan mensosialisasikan program rehabilitasi,
2. Dukungan dari masyarakat yang aktif melaporkan di lingkungannya jika terdapat penyalahguna narkoba
3. adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang program rehabilitasi

9.	Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana Narkotika yang P. 21
-----------	---

Definisi Operasional :

Yang dimaksud dengan jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika P. 21 adalah akumulasi data berkas perkara kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika yang telah lengkap dan cukup untuk diajukan ke Kejaksaan. Data kasus tindak pidana narkotika P. 21 merupakan dokumen penyidikan yang telah rampung atau lengkap berdasarkan hasil asistensi Kejaksaan dan siap untuk diajukan atau dilanjutkan ke proses peradilan.

Adapun tahap dimaksud sebagai berikut :

P-1	Penerimaan Laporan (Tetap)
P-2	Surat Perintah Penyelidikan
P-3	Rencana Penyelidikan
P-4	Permintaan Keterangan
P-5	Laporan Hasil Penyelidikan
P-6	Laporan Terjadinya Tindak Pidana
P-7	Matrik Perkara Tindak Pidana
P-8	Surat Perintah Penyidikan
P-8A	Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan
P-9	Surat Panggilan Saksi / Tersangka
P-10	Bantuan Keterangan Ahli
P-11	Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli
P-12	Laporan Pengembangan Penyidikan
P-13	Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan
P-14	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
P-15	Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara
P-16	Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana
P-16A	Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
P-17	Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan
P-18	Hasil Penyelidikan Belum Lengkap
P-19	Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi
P-20	Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis
P-21	Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
P-21A	Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap
P-22	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
P-23	Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Sumber : HO(<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5170/p-18,-p-19,-p-21,-dan-lain-lain>)

Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkoba P. 21 di Satuan kerja Badan Narkotika Nasional Kota Palopo adalah sebanyak 10 berkas dari 10 jumlah tersangka seperti pada tabel di bawah ini.

Bekas perkara kasus tindak pidana narkoba

Satuan kerja Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Tahun 2019

NO	NAMA TERSANGKA	STATUS	KET
1	ABADI ALS BADUR	P.21	
2	RISALDI SAPUTRA MALIK ALIAS ISTO BIN ABD.MALIK	P.21	
3	RENALDY ALIAS OKY	P.21	
4	SUSANTI KAHAR ALIAS SANTI BIN KAHARUDDIN	P.21	

5	AISYAH ABDULLAH ALIAS ANTI BINTI ABDULLAH	P.21	
6	MELINDA CHANDRA ALIAS MEME	P.21	
7	ARIZAL JAFAR ALIAS UNYIL BIN JAFAR	P.21	
8	RUSNA, S.AN ALIAS MUMU BINTI RISAL	P.21	
9	SANDI BIN ASRUDDIN	P.21	
10	MUH. AFANDI ALIAS BOJES BIN AMIR	P.21	

Dari capaian tersebut di atas, sehingga capaian Kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REAL	%
1	Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika P. 21 BNN Kota Palopo	4 berkas	10 berkas	250

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja kegiatan ini adalah:

1. Semangat tim Seksi Pemberantasan dalam melaksanakan tugas;
2. Dukungan dari lintas sektor;
3. Dukungan alat intelijen.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pemberantasan, walaupun target terpenuhi, namun tetap ditemui beberapa kendala yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan seksi pemberantasan:

1. kurangnya personil pada seksi pemberantasan, khususnya tenaga penyidik
2. belum adanya fasilitas ruang tahanan
3. keterbatasan anggaran dalam pengembangan kasus

Rekomendasi untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan tambahan personil;
2. Pengajuan pengadaan fasilitas ruang tahanan;
3. Pengajuan tambahan anggaran.
4. Pelaksanaan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya.

10.	Nilai Kinerja Anggaran
------------	-------------------------------

Definisi Operasional

Nilai Kinerja anggaran adalah nilai aspek implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tahun 2011 tentang pengukuran kinerja anggaran kementerian dan lembaga.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun anggaran 2019 diketahui nilai kinerja anggaran BNN Kota Palopo sebesar 90,77 % dengan predikat **"sangat baik"**. dengan rincian, nilai penyerapan sebesar 9,65 %; Nilai konsistensi sebesar 1,51 %; Nilai Capaian Keluaran adalah sebesar 56,29 % dan nilai efisiensi sebesar 23,32

Tabel
Capaian aspek implementasi kinerja dan anggaran
BNN Kota Palopo tahun 2019.

REKAPITULASI CAPAIAN													
No	Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Penyerapan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.44%
2	Konsistensi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.29%
3	Capaian Keluaran	54.41%	61.18%	69.22%	77.30%	81.32%	86.82%	95.44%	97.45%	110.05%	110.54%	174.02%	129.41%
4	Efisiensi	300.00%	300.00%	300.00%	300.00%	300.00%	300.00%	300.00%	300.00%	300.00%	300.00%	300.00%	81.55%

CAPAIAN KINERJA ASPEK IMPLEMENTASI														
No	Kategori	Ratio	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Penyerapan	9.7%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.65%
2	Konsistensi	18.2%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.51%
3	Capaian Keluaran	43.5%	23.67%	26.61%	30.11%	33.63%	35.38%	37.63%	41.52%	42.39%	47.87%	48.08%	75.70%	56.29%
4	Efisiensi	28.6%	85.80%	85.80%	85.80%	85.80%	85.80%	85.80%	85.80%	85.80%	85.80%	85.80%	85.80%	23.32%
Hasil		100%	109.47%	112.41%	115.91%	119.43%	121.18%	123.48%	127.32%	128.19%	133.67%	133.88%	161.50%	90.77%
			<i>Sangat Baik</i>											

Catatan :
1. Capaian Keluaran (Output) harus terisi secara akumulatif setiap bulan dan memiliki *trend* capaian naik setiap bulannya
2. Apabila hal tersebut di atas tidak dilakukan, maka kriteria hasil capaian "*Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, dan Sangat Kurang*" dievaluasi menjadi NA/Not Available/Tidak Termini

Sumber : Aplikasi Sismonevgar BNN Tahun 2019

Berdasarkan data di atas bila dibandingkan dengan target capaian pada indikator kinerja, nilai kinerja anggaran BNN Kota Palopo tahun anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REAL	%
1	Nilai kinerja anggaran	88 %	90,77 %	103,14

Adapun faktor pendukung tercapainya indikator kinerja adalah :

1. Realisasi anggaran yang mencapai target;
2. Tercapainya target realisasi output;
3. Realisasi sebagian output melebihi target;
4. Konsistensi rencana penyerapan anggaran.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah Kota Palopo, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Kota Palopo yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

- a. Gedung bangunan Kantor Milik BNN Kota Palopo
- b. Tanah / Lahan Bangunan Kantor sudah milik BNN Kota Palopo hibah dari Pemerintah Daerah Kota Palopo
- c. Anggaran DIPA
- d. Sarana Kendaraan Operasional, Peralatan, sarana dan prasarana dukungan kantor
- e. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah Kota Palopo

- f. Adanya beberapa OPD, Lembaga swasta, pendidikan dan masyarakat yang telah menyusun MoU P4GN dengan BNN Kota Palopo

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kota Palopo, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Palopo adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan SDM, yang saat ini SDM berjumlah 16 orang dari total kebutuhan sesuai DSP sebanyak 78 orang.
- b. Keterbatasan Sarana, antara lain Gedung dan sarana prasarana Klinik yang sesuai standar, Ruang Tahanan, dan sarana lainnya untuk mendukung program P4GN
- c. Keterbatasan alat intelijen dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika
- d. Jumlah SDM tidak sebanding dengan luas wilayah kerja khususnya pada bidang pemberantasan
- e. Kebijakan program P4GN di daerah baik berupa regulasi dan penganggaran kegiatan belum maksimal
- f. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mengikuti program rehabilitasi
- g. Kompetensi SDM.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Kota Palopo sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Palopo merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah kerja BNN Kota Palopo yang meliputi Luwu Raya. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Kota Palopo juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kota Palopo sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Palopo sebagai berikut:

- 1) Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ke dalam seluruh isu dan sector pembangunan melalui konsep penganggaran berwawasan anti narkoba, kebijakan berbasis anti narkoba, serta mendorong pembangunan karakter manusia dengan memasukkan nilai-nilai

hidup sehat tanpa narkoba ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai lanjut atas;

- 2) Menumbuhkembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari tingkat kelurahan dengan mendorong relawan-relawan menjadi pelaku P4GN secara mandiri;
- 3) Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalah guna, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan peran K/L dalam pemanfaatan infrastruktur dan sumberdaya K/L di daerah;
- 4) Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan menyita seluruh asset terkait kejahatan narkotika dengan menjalin kerjasama dan kemitraan yang harmonis dengan penegak hukum khususnya dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba;
- 5) Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi good governance dan clean governance di Lingkungan BNN Kota Palopo

BAB III

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. RENCANA KINERJA

Badan Narkotika Nasional Kota Palopo menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Kota Palopo menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Provinsi.

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Kota Palopo yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Kota Palopo merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah kerja BNN Kota Palopo.

Adapun rencana target kinerja BNN Kota Palopo Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN Kota Palopo tahun 2020-2024 sebesar rupiah,. Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang pencegahan dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran.

Adapun rencana kebutuhan pendanaan unit kerja BNN Kota Palopo tahun 2020-2024 secara detail disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Kota Palopo Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN Kota Palopo 2020-2024. Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Kota Palopo Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja BNN Kota Palopo sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Lampiran
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Kota Palopo
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51	51	51	52	52
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	78,67	78,67	79	79
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"					
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)					

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5	5	5	10	10
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis					
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	2	3	3	3
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	1	2	2	2
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil dipetakan*)					
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	4	4	5	8	10
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)					
9.	Pengawasan Tahanan	Meningkatnya pengawasan	Nilai tingkat keamanan, ketertiban,					

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
	dan Barang Bukti	tahanan dan barang bukti narkotika	dan kesehatan tahanan					
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika					
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)					
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86	86	88	88	88
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	94	96	97	97

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

Lampiran
Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Kota Palopo
Tahun 2020-2024

(Dalam ribuan rupiah)

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	160.400	210.000	220.000	245.000	250.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	48.500	65.000	65.000	70.000	78.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	229.580	229.580	230.000	245.000	250.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"					

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)					
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	13.800	13.800	15.000	25.000	30.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis					
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	48.900	120.000	120.000	125.000	130.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	41.260	41.260	45.000	48.000	55.000
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK					
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil dipetakan*)					
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	225.000	225.000	250.000	250.000	300.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya					

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
			yang dimusnahkan*)					
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	70.000	80.000	90.000	100.000	120.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika					
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)					
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	40.740	40.740	45.000	48.000	50.000
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	132.548	132.548	152.500	160.000	164.000

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

Lampiran
Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen
Badan Narkotika Nasional Kota Palopo
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	Diskusi Interaktif Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika
				Diseminasi Informasi Melalui Insert Konten
				Diseminasi Informasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang
				Diseminasi Informasi melalui Branding Sarana Publik /Sekolah
				Diseminasi Informasi melalui Placement Televisi Daerah dan Radio Lokal
				Diseminasi Informasi Melalui Kegiatan Talk Show
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
				Koordinasi dalam rangka Pengayaan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
		Narkoba		referensi Advokasi di BNNP Fasilitasi Program Ketahanan keluarga Anti Narkoba Intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bersinar Rapat Koordinasi Pembentukan Desa Bersinar
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Indeks Kemandirian Partisipasi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Rapat teknis BNNP dan BNNK dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti narkoba instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan pendidikan Workshop Penggiat anti narkoba instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Pendidikan Pemberdayaan masyarakat melalui tes urine di lingkungan Pemerintah, Swasta,

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				Masyarakat dan Pendidikan Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada sektor Kelembagaan Workshop penguatan kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam mewujudkan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada sektor Kewilayahan Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat instansi Pemerintah, swasta, masyarakat dan Pendidikan Evaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Instansi Pemerintah, swasta, masyarakat dan Pendidikan
				Pengumpulan data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba lingkungan Pemerintah, Swasta, masyarakat dan pendidikan
				Workshop penguatan kapasitas kepada

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	Bimbingan Teknis Fasilitas Rehabilitasi Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Bimbingan Teknis Fasilitas Rehabilitasi Komponen Masyarakat Rapat koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota
			Layanan rehabilitasi di Klinik BNNK	Operasional Klinik / Fasilitas Rehabilitasi Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan
			Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	Layanan SKHPN
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	Pembentukan Unit IBM Operasional Unit IBM Supervisi dan Asistensi operasional IBM
7.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	Penyelidikan Kasus Narkotika Penyidikan Kasus Narkotika Koordinasi Kelembagaan Tingkat Pusat dan Provinsi Pelatihan Penyidik BNNK
8.	Penyusunan dan Pengembangan	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNK	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Koordinasi Penyusunan RKA

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	Rencana Program dan Anggaran BNN		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi
				Koordinasi Penyusunan Laporan
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	Layanan Manajemen Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
				Monitoring dan Evaluasi
			Layanan Perkantoran	Operasional Perkantoran